

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keberhasilan sebuah pemerintah salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Purwanti, 2009).

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam usaha memajukan pembangunan bangsa karena terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Suroto dalam Tindaon (2010), tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan, yang berperan sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang/jasa, serta sebagai sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar.

Di dalam teori Cobb Douglas, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal dari peningkatan input tenaga kerja, modal, dan teknologi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara sering menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan sehingga diharapkan dapat memicu pertumbuhan penyerapan input produksi salah satunya tenaga kerja.

Permasalahan yang akan selalu dihadapi sektor ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Pengangguran merupakan dampak dari jumlah

angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dari pada kesempatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 diketahui bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 8.319.779 jiwa, 2011 jumlahnya 8.117.631 jiwa, 2012 sebanyak 7.310.000 jiwa, 2013 dan 2014 adalah 7.410.000 jiwa dan 7.240.000 jiwa. Walaupun angka pengangguran 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak cukup signifikan. Karena hingga tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia masih berkisar pada 5,94 persen.

Menurut Tjiptoherijanto (1996) masalah ketenagakerjaan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angkatan kerja dan kebijakan ketenagakerjaan itu sendiri. Masalah yang terjadi di Indonesia adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung seluruh jumlah angkatan kerja yang ada. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun (BPS, 2011). Begitupun yang terjadi di Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dimana jumlah lapangan kerja yang tersedia juga belum mampu menampung seluruh angkatan kerja yang ada sehingga tingkat pengangguran di Sumatera Barat masih cukup tinggi.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang strategis dan memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena permintaan dari tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan output. Sehingga secara logika terjadi pergerakan

yang sama antara pertumbuhan permintaan output dengan penyerapan tenaga kerja (Smith, 2003).

Dengan membaiknya kondisi perekonomian maka kondisi ketenagakerjaan akan turut membaik yang dapat tercermin dari terjadinya proses penyerapan tenaga kerja. Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan cukup luas, menyerap tenaga kerja dalam maknanya menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha, untuk dapat sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri.

Menurut data BPS, dari 5.305.311 jiwa jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2014, angkatan kerjanya sebesar 2.331.993 jiwa yang terdiri dari 2.180.336 jiwa penduduk bekerja dan 151.657 jiwa pengangguran terbuka, dengan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,5 persen. Hal ini memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Sumatera Barat masih tinggi jauh dari target pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka sebesar 5 sampai 6 persen.

Bergeraknya aktivitas perekonomian di berbagai sektor di Sumatera Barat seharusnya juga diikuti oleh kemampuan masing-masing sektor untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja di Sumatera Barat. Tercatat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2014, jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat mengalami peningkatan kearah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kapasitas produksi dan proses ekonomi di Sumatera Barat. Namun peningkatan jumlah produk barang dan jasa yang ada di Sumatera Barat tersebut belum diikuti oleh permintaan jumlah tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengangguran di Sumatera Barat yang justru relatif meningkat dalam kurun waktu dari tahun 1996 sampai dengan 2014 serta masih mencapai angka 13,7 persen di tahun 2005. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meningkatnya sektor-sektor

perekonomian di Sumatera Barat belum diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja serta belum mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja secara optimal sehingga masih menyisakan tenaga kerja yang belum diberdayakan dalam bentuk pengangguran.

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Investasi dari penanam modal dalam negeri maupun asing merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara yang secara tidak langsung masuk kedalam kas negara. Investasi tersebut memerlukan beberapa faktor penunjang antara lain produk hukum yang mengatur kegiatan investasi tersebut, agar pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan dapat dijalankan dengan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memberikan pembedaan antara penanam modal dalam negeri dengan penanaman modal asing.

Dari segi Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi pada saat ini. Faktor-faktor yang seharusnya dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri di Sumatera Barat. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat merangsang iklim dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Dalam tahun-tahun terakhir, Sumatera Barat telah mengalami suatu peristiwa perubahan alam yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang luar biasa namun demikian masih tetap berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Investasi yang ada di Sumatera Barat secara umum meliputi sektor ; Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, serta Pariwisata. Pencapaian investasi total Sumatera Barat pada tahun 2012 mencapai Rp.1.580,59 triliun dengan rincian Penanam Modal Dalam Negeri sebesar Rp. 749,93 milyar dan Penanam Modal Asing sebesar 86.194,90 ribu dollar AS atau sebesar 830,66 milyar dengan penyerapan tenaga kerja tercatat 204 orang satu diantaranya tenaga kerja asing (antarasumbar.com).

Adanya serikat pekerja dan intervensi pemerintah berupa penetapan upah minimum provinsi juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Menurut teori

permintaan tenaga kerja, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik, sedangkan input lainnya tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari pada input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang harganya relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat upah minimum provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 1996-2014 dari 108.000 rupiah sampai 1.490.000 rupiah tahun 2014. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami fluktuasi dari tahun 1996-2014 dimana relatif mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja mulai dari tahun 2005-2012 dari 1.717.289-2.085.483 jiwa. Tenaga kerja pada sektor formal selalu mengalami peningkatan namun tingkat penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal. Dikarenakan lapangan pekerjaan sektor formal yang ada di Sumatera Barat masih sedikit dibandingkan sektor informal. Yang membuat tenaga kerja di Sumatera Barat lebih memilih bekerja di sektor informal daripada memilih menjadi pengangguran. Hal ini bertentangan dengan teori permintaan tenaga kerja di atas yang menyatakan bahwa peningkatan upah akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

Pada penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2013 terjadi kasus demonstrasi buruh secara besar-besaran di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2012 termasuk di Sumatera Barat, dikarenakan para buruh menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik lagi. Kemudian disepakati upah buruh naik cukup tinggi dimana kenaikan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat naik dari

1.150.000 rupiah menjadi 1.350.000 rupiah di tahun 2013, kenaikan tersebut sebesar 17,39 persen. Tetapi, hal ini memicu protes dari kalangan pengusaha dan mereka mengancam untuk memindahkan bisnisnya keluar atau menutup usahanya. Yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat mengalami penurunan dari 2.085.483 jiwa tahun 2012 menjadi 2.061.109 jiwa tahun 2013 dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,02 persen, ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6,65 persen.

1.2 Rumusan Masalah

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat belum mampu memperluas lapangan kerja, hal ini ditunjukkan dengan masih besarnya jumlah angkatan kerja daripada kesempatan kerja yang membuat tingkat pengangguran di Sumatera Barat masih jauh dari tingkat pengangguran normal sebesar 4 persen.

Dari data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, terlihat kenaikan PDRB Sumatera Barat yang terjadi tahun 2012 dari 43,925 juta menjadi 46,640 juta tahun 2013 malah berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja dan kualitas pekerjaan. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengangguran dari 148.524 jiwa di tahun 2012 menjadi 155.578 jiwa tahun 2013 kenaikan pengangguran tersebut sebesar 7,02 persen jauh dari tingkat pengangguran normal yang wajar terjadi dalam perekonomian.

Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut maka di butuhkan kajian mengenai ketenagakerjaan yakni “**Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat**” beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini :

1. Bagaimana keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat?

2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa implikasi kebijakan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat.
3. Merumuskan implikasi kebijakan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sekaligus rekomendasi mengenai strategi kebijakan yang optimal untuk mengurangi tingginya pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini bisa menjadi informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis ataupun lebih lanjut.
3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari di bidang ekonomi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup seluruh sektor formal maupun informal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di batasi pada Upah Minimum Provinsi (UMP), pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan investasi. Objek penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat dengan periode waktu 1996-2014. Adapun data yang di peroleh dari publikasi-publikasi yang di terbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, dan Depnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

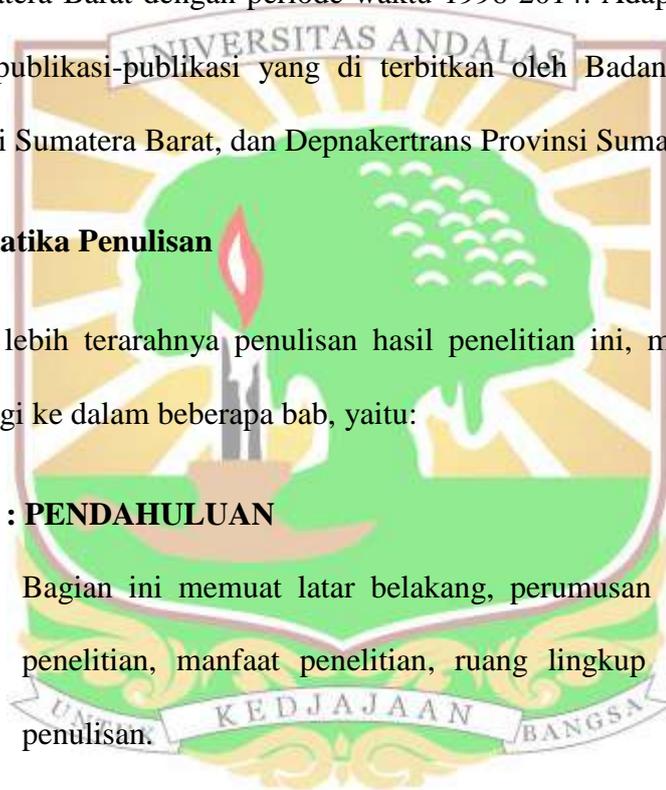
Untuk lebih terarahnya penulisan hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini mengemukakan konsep tenaga kerja, konsep penyerapan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja: pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan investasi, teori permintaan tenaga kerja, kerangka berfikir dan hipotesa.



BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan lokasi penelitian, data dan sumber data, metode analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bagian ini menjelaskan tentang Provinsi Sumatera Barat, keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, perkembangan upah minimum provinsi, perkembangan pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penemuan empiris dari variabel-variabel yang diuji.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

